

2021

**ANALISIS SEKTOR
UNGGULAN
KABUPATEN NATUNA**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

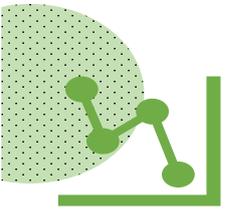
2021

**ANALISIS SEKTOR
UNGGULAN
KABUPATEN NATUNA**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

<https://natunakab.bps.go.id>



Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Natuna 2021

ISSN :

No. Publikasi : 21030.2220

Katalog : 9199024.2103

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : ix + 37

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

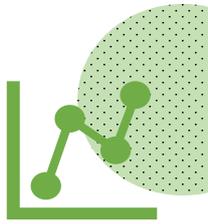
Pencetak :

-

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.



Tim Penyusun
Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Natuna 2021

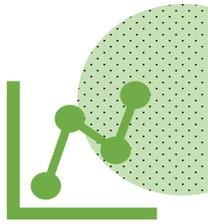
Penanggung Jawab Teknis:
Wahyu Dwi Sugianto

Editor:
Muhamad Andries

Penulis:
Lia Oktavera

Desain/Layout:
Lia Oktavera





KATA PENGANTAR



Publikasi Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Natuna 2021 merupakan terbitan pertama kali yang disusun oleh BPS Kabupaten Natuna. Publikasi ini menyajikan analisis pertumbuhan ekonomi serta mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Natuna yang dapat diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor unggulan ini sudah didapatkan dari publikasi Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat dijabarkan dan dianalisa lebih dalam sesuai dengan wilayah serta potensi yang ada.

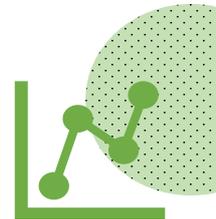
Sektor unggulan diidentifikasi berdasarkan PDRB Non-Migas Kabupaten Natuna tahun 2019-2021, selain itu juga mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional dan mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur perekonomian terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna. Saran dan kritik yang konstruktif dalam menjaga kualitas publikasi ini dimasa yang akan datang, sangat kami harapkan.



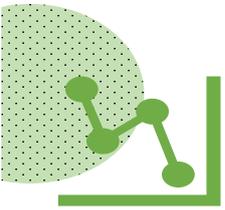
Ranai, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna

Wahyu Dwi Sugianto, SST, MSi



Daftar Isi

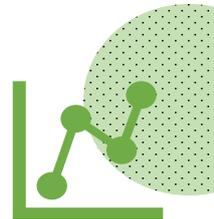
	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
BAB 2. KONSEP DAN DEFINISI	
2.1. Konsep dan Definisi	7
2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita	10
2.3. Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota	13
2.4. Metode Location Quotient (LQ)	14
2.5. Analisis Pergeseran (Shift Share Analysis)	15
2.6. Analisis Overlay	19
BAB 3. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN	
3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita	25
3.2. Analisis Location Quotient (LG)	29
3.3. Analisis Shift Share	31
3.4. Analisis Tipologi Klasen	35



Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1.	Pengelompokan Tipologi Klassen	20
Tabel 3.1.	Wilayah dengan Distribusi PDRB ADHB Terhadap Provinsi Kepulauan Riau , 2019-2021 (%)	26
Tabel 3.2.	Wilayah dengan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Riau, 2019-2021 (juta rupiah)	28
Tabel 3.3.	Analisis Location Quotient Kabupaten Natuna, 2019-2021	30
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Sektoral (PS) Kabupaten Natuna, 2019-2021	32
Tabel 3.5.	Daya Saing (DS) Kabupaten Natuna, 2019-2021	34
Tabel 3.6.	Pengelompokan Tipologi Klassen Kabupaten Natuna, 2019-2021...	35

<https://natunakar.bps.go.id>



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1. Diagram Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita	13
Gambar 2.2. Profil Pertumbuhan Sektoral Perekonomian	18
Gambar 2.3. Diagram Pengelompokan TS dan LQ	21
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau (Migas) (%)	27
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau (Tanpa Migas) (%)	27

<https://natunakab.bps.go.id>

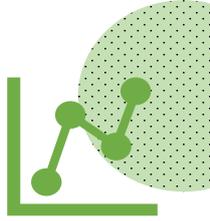


PENDAHULUAN

<https://natunakab.bps.go.id>

1





BAB 1

PENDAHULUAN

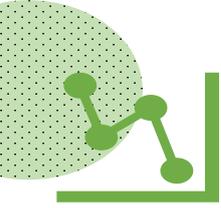
1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pemerintah daerah harus berpartisipasi dengan masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya agar merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, karena tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga-harga, mengatasi masalah pengangguran, dan mewujudkan distribusi pendapatan yang merata, dengan didukung oleh faktor-faktor modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja serta teknologi sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar kategori serta perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah perlu mengetahui perlu diketahui sumber daya potensial apa yang ada di daerah tersebut sehingga dapat memaksimalkan tujuan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut mengenali potensi yang dimiliki daerahnya karena menurut (Blakely, 1994) dalam (Kuncoro, 2010) pembangunan yang berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik potensial dapat menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal.

Mengetahui sektor unggulan dan potensi perekonomian daerah menjadi strategi



Bab 1 PENDAHULUAN

penentu pertumbuhan ekonomi regional dalam era otonomi, serta berlomba-lomba dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan publikasi Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Natuna 2021 adalah menganalisis pertumbuhan ekonomi serta mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Natuna yang dapat diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



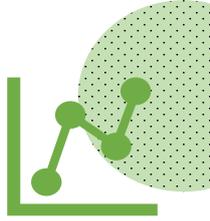
<https://natunakab.bps.go.id>



KONSEP & DEFINISI

2





BAB 2

KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Konsep dan Definisi PDRB

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

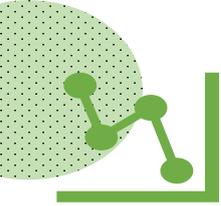
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Pada publikasi ini, PDRB dihitung menggunakan pendekatan produksi, yaitu PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan menjadi 17 kategori, yaitu: 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi ; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

2.1.2. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Perhitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam



penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

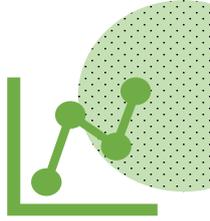
Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

a. Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.



c. Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

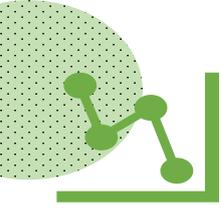
d. Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya.

Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

Penyajian Data Produk Domestik Regional Bruto

Data PDRB terdiri dari PDRB menurut sektor/lapangan usaha dan menurut penggunaan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit. Indeks perkembangan diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan adalah sebagai berikut:



$$IP_t = \frac{PDRB_t}{PDRB_0} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

Indeks berantai diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh angka laju pertumbuhan. dimana:

$$IB_t = \frac{PDRB_t}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.2)$$

IP_t = Indeks Perkembangan

IB_t = Indeks Berantai

PDRB_t = PDRB Tahun ke-t

PDRB₀ = PDRB Tahun Dasar

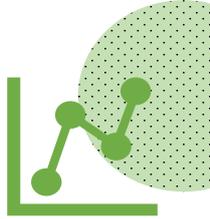
PDRB_{t-1} = PDRB 1 Tahun sebelum Tahun ke-t

2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan menghilangkan pengaruh inflasinya terlebih dahulu.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.3)$$



dimana:

LPE = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa (t-1) tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left(\sqrt[n]{\frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}}} - 1 \right) \times 100\% \dots\dots\dots(2.4)$$

dimana:

r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun

n = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)

t_n = Tahun terakhir periode

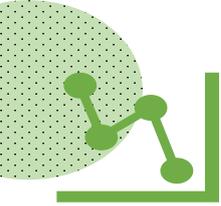
t_0 = Tahun awal periode

Pendapatan per kapita dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran pendapatan per kapita dapat dihitung dengan formula berikut:

$$Pendapatan Perkapita_t = \frac{PDRB ADHB Tahun ke - t}{\sum Penduduk Pertengahan Tahun ke - t} \dots\dots\dots(2.5)$$

Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997) disebut sebagai Tipologi Klassen disajikan pada Gambar 2.1. dalam bentuk "diagram empat kuadran", dimana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita.





Bab 2 KONSEP DAN DEFINISI

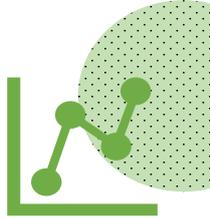
Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horizontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horizontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kanan atas), kuadran II (terletak di sudut kanan bawah), kuadran III (terletak di sudut kiri bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri atas).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata Kepulauan Riau. Apabila terletak pada titik kuadran II, ini menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Kepulauan Riau, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan Kepulauan Riau. Selanjutnya titik di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita Kepulauan Riau, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan Kepulauan Riau. Kuadran IV berarti kabupaten/ kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata Kepulauan Riau, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan Kepulauan Riau.

Kabupaten/kota yang terletak di kuadran I disebut “daerah maju dan cepat tumbuh” yang secara relatif menunjukkan daerah–daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata Kepulauan Riau.

Kabupaten/kota yang terletak di kuadran II merupakan “daerah maju tapi tertekan”, secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kepulauan Riau.

Sedangkan kabupaten/kota yang digambarkan di kuadran III disebut “daerah tertinggal”, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.



Kabupaten/kota di kuadran IV disebut “daerah berkembang dan cepat”, menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah, sehingga Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, kabupaten/kota tersebut masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain.

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran IV Daerah Berkembang dan Cepat	Kuadran I Daerah maju dan cepat tumbuh
	Kuadran III Daerah Tertinggal	Kuadran II Daerah Maju tapi Tertekan

Pendapatan Perkapita

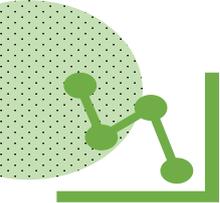
Gambar 2.1. Diagram Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita

2.3. Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, ketimpangan ekonomi juga dapat digambarkan dengan ketimpangan sektoral antar wilayah. Indikator ketimpangan/ disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukurannya adalah semakin besar nilai indeks,





Bab 2 KONSEP DAN DEFINISI

semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya dan sebaliknya, semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik. Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots(2.6)$$

dimana:

IW = Indeks Williamson

\bar{Y} = Rata-rata pendapatan (PDRB per kapita) di Provinsi Kepulauan Riau

Y_i = Pendapatan (PDRB per kapita) di region ke-i

f_i/n = Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau

i = 1,2, ..., 7 (Kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau)

2.4. Metode *Location Quotient* (LQ)

Salah satu metode untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau sektor non basis adalah dengan menggunakan metode LQ. Pada metode ini penentuan sektor basis dan non basis dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara pendapatan atau tenaga kerja di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan atau tenaga kerja total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan atau tenaga kerja di sektor i pada daerah atas terhadap pendapatan atau tenaga kerja semua sektor di daerah atasnya.

$$LQ_K = \frac{Y_{iK}/Y_K}{Y_{iP}/Y_P} \dots\dots\dots(2.7)$$

dimana:

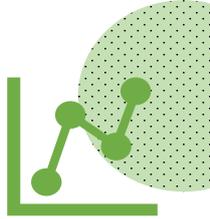
LQ_k = *Location Quotient* Kabupaten/Kota

Y_{ik} = PDRB sektor i pada kabupaten/kota

Y_k = PDRB semua sektor pada kabupaten/kota

Y_{ip} = Penjumlahan PDRB sektor i semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

Y_p = Penjumlahan dari Y_{ip}



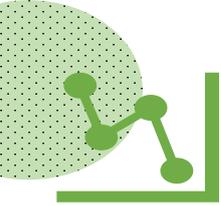
Jika hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan nilai $LQ > 1$, maka sektor i dikategorikan sebagai sektor basis. Nilai LQ yang lebih besar dari satu tersebut menunjukkan bahwa pangsa pendapatan/tenaga kerja pada sektor i di daerah bawah lebih besar dibanding daerah atasnya dan output pada sektor i lebih berorientasi ekspor. Sebaliknya, jika nilai $LQ < 1$ sektor i diklasifikasikan sebagai sektor non basis.

2.5. Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional.

Disamping itu, analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan. Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (provinsi). Dalam analisis ini metode analisis bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi provinsi (PP), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap perekonomian kabupaten/kota. Dalam hal ini menggunakan pertumbuhan ekonomi PDRB provinsi, dimana PDRB provinsi merupakan penjumlahan PDRB kabupaten/kota.
2. Pertumbuhan sektoral atau pergeseran proporsional yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di provinsi (PS). Pergeseran proporsional disebut juga pengaruh bauran industri. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian kabupaten/kota terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian provinsi.



Bab 2 KONSEP DAN DEFINISI

3. Pertumbuhan daya saing wilayah atau pergeseran diferensial yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri kabupaten/kota dengan perekonomian provinsi (DS). Jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian provinsi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Formula yang digunakan untuk analisis shift share ini adalah sebagai berikut:

- Dampak riil pertumbuhan ekonomi

$$D_{ik} = P_{ikj} + M_{ik} + C_{ik} \text{ atau } E_{ik}^* - E_{ik} \dots\dots\dots (2.8)$$

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi

$$P_{ik} = E_{ik} \times r_p \dots\dots\dots (2.9)$$

- Pergeseran proporsional atau pengaruh bauran industri

$$M_{ik} = E_{ik} (r_{ip} - r_p) \dots\dots\dots (2.10)$$

- Pengaruh keunggulan kompetitif

$$C_{ik} = E_{ik} (r_{ik} - r_{ip}) \dots\dots\dots (2.11)$$

Dengan demikian, persentase ketiga pertumbuhan wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PP = r_p \dots\dots\dots (2.12)$$

$$PS = r_{ip} - r_p \dots\dots\dots (2.13)$$

$$DS = r_{ik} - r_{ip} \dots\dots\dots (2.14)$$

Keterangan:

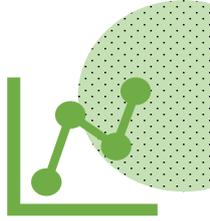
E_{ik} = PDRB ADHK di sektor i kabupaten/kota tahun dasar

r_{ik} = laju pertumbuhan di sektor i kabupaten/kota tahun akhir

r_{ip} = laju pertumbuhan provinsi di sektor i tahun akhir

r_p = laju pertumbuhan ekonomi provinsi tahun akhir

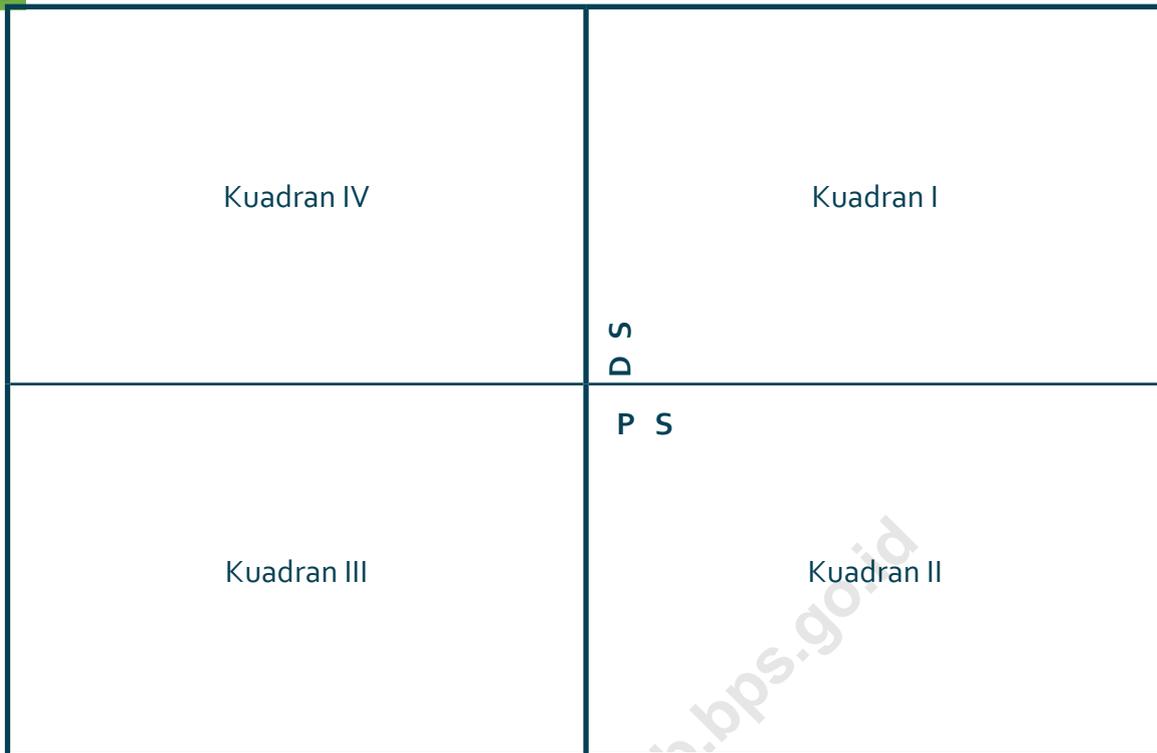
Dari besaran persen perubahan komponen pertumbuhan sektor i kabupaten/kota (PS) dan pertumbuhan daya saing wilayah (DS) dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor perekonomian di suatu wilayah pada kurun waktu yang telah ditentukan dalam bentuk kuadran. Pada sumbu horizontal,



terdapat PS sebagai absis dan pada sumbu vertikal terdapat DS sebagai ordinat.

- Kuadran I (PS positif dan DS positif) menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat, demikian juga daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor/wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah progresif maju (rapid growth region).
- Kuadran II (PS positif dan DS negatif) menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah yang bersangkutan pertumbuhannya cepat, tetapi daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya tidak baik (depressed region yang berpotensi).
- Kuadran III (PS dan DS negatif) menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor/wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah lamban.
- Kuadran IV (PS negatif dan DS positif) menunjukkan bahwa sektorsektor ekonomi pada wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat tapi daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.





Gambar 2.2. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian

Apabila komponen pertumbuhan sektoral dan pertumbuhan daya saing wilayah dijumlahkan, maka akan diperoleh total shift (pergeseran bersih) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu sektor perekonomian. Pergeseran bersih sektor *i* pada suatu kabupaten/kota dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TS_{ik} = PS_{ik} + DS_{ik} \dots\dots\dots(2.12)$$

dimana:

TS_{ik} = Pergeseran bersih sektor *i* pada kabupaten/kota

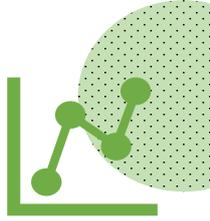
PS_{ik} = Komponen pertumbuhan sektoral sektor *i* pada kabupaten/kota

DS_{ip} = Komponen pertumbuhan daya saing sektor *i* pada kabupaten/kota

Apabila $TS_{ik} > 0$, maka pertumbuhan sektor *i* pada kabupaten/kota termasuk ke dalam kelompok progresif. Jika $TS_{ik} < 0$, maka pertumbuhan sektor *i* pada kabupaten/kota termasuk lamban.

Keunggulan analisis Shift Share antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis shift share tergolong sederhana.



2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan analisis *Shift Share*, yaitu:

1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

2.6. Analisis Overlay

Analisis *overlay* digunakan untuk memetakan sektor prioritas dengan menggabungkan hasil dari metode LQ dengan metode shift share yaitu nilai pertumbuhan sektoral (PS) dan nilai pertumbuhan daya saing wilayah (DS). Notasi positif berarti koefisien komponen bernilai lebih dari nol dan negatif kurang dari nol, serta nilai LQ lebih dari satu. Sektor yang mempunyai nilai PS, DS, dan LQ yang positif maka sektor tersebut dapat menjadi sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan menjadi sektor unggulan di wilayah tersebut. Dari analisis *overlay* ini kemudian dilakukan pengelompokan sektor unggulan berdasarkan tingkat keunggulannya menurut tipologi Klassen.

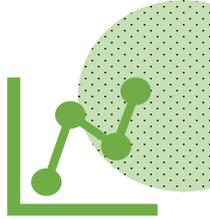


Tipologi	LQ	PS	DS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	>1	>0	>0	Istimewa
2	>1	>0	<0	Baik Sekali
3	>1	<0	>0	Baik
4	>1	<0	<0	Lebih dari Cukup
5	<1	>0	>0	Cukup
6	<1	>0	<0	Hampir dari Cukup
7	<1	<0	>0	Kurang
8	<1	<0	<0	Kurang Sekali

Tabel 2.1. Pengelompokan Tipologi Klassen

Berdasarkan tipologi Klassen terdapat 8 tipologi sektor unggulan, yaitu:

1. Sektor yang dapat dinilai "istimewa" keunggulannya karena termasuk sektor basis, mempunyai pertumbuhan yang cepat dan mampu berdaya saing.
2. Sektor yang dinilai "baik sekali" karena termasuk sektor basis, mempunyai pertumbuhan yang cepat, namun kurang berdaya saing.
3. Sektor yang tergolong basis, namun pertumbuhannya lambat, sedangkan daya saingnya baik. Sektor ini termasuk dalam sektor yang dinilai "baik".
4. Sektor basis, namun pertumbuhan lambat dan kurang berdaya saing. Sektor ini dinilai "lebih dari cukup" keunggulannya.
5. Sektor yang dinilai "cukup" karena bukan sektor basis, namun pertumbuhannya cepat dan berdaya saing baik.
6. Sektor yang dinilai "hampir dari cukup" keunggulannya karena bukan sektor basis dan kurang berdaya saing, namun pertumbuhannya cepat.
7. Sektor yang dinilai "kurang" karena bukan sektor basis dan pertumbuhannya lambat, namun berdaya saing baik.
8. Sektor yang keunggulannya dinilai "kurang sekali". Sektor ini bukan sektor basis, pertumbuhannya lambat dan kurang berdaya saing.



Perbandingan absolut antar sektor dapat disederhanakan dengan mengelompokkan dalam "diagram empat kuadran", di mana sumbu horizontal menggambarkan TS dengan titik pusat pada angka nol, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan LQ dengan titik pusat pada angka satu (Gambar 2.3.).

Kuadran IV Sektor Potensial	Kuadran I Sektor Unggulan
Kuadran III Sektor Terbelakang	Kuadran II Sektor Berkembang
$TS < 0$	$TS > 0$
$LQ > 1$	$LQ < 1$

Gambar 2.3. Diagram Pengelompokan TS dan LQ

- Kuadran I (TS positif dan $LQ > 1$) menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan merupakan Sektor Unggulan, karena memiliki pertumbuhan progresif dan merupakan sektor basis.
- Kuadran II (TS positif dan $LQ < 1$) menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan merupakan Sektor Berkembang, karena memiliki pertumbuhan progresif namun bukan merupakan sektor basis.
- Kuadran III (TS negatif dan $LQ < 1$) menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan merupakan Sektor Terbelakang, karena memiliki pertumbuhan lambat dan bukan merupakan sektor basis.
- Kuadran IV (TS negatif dan $LQ > 1$) menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan merupakan Sektor Potensial, karena memiliki pertumbuhan lambat namun merupakan sektor basis.

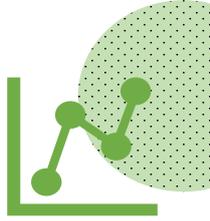


ANALISIS

<https://natunakab.bps.go.id>

3





BAB 3

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domesti Regional Bruto (PDRB). Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional mampu mendorong keagairahan daerah untuk mengembangkan perkonomiannya di masing-masing daerah agar mampu memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerahnya untuk mengelola sendiri keuangan sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk dapat melakukan perencanaan yang tepat dalam pembangunan ekonomi maka dibutuhkan pengetahuan pihak pemerintah akan keunggulan dibidang ekonomi pada daerah yang bersangkutan agar tujuan pembangunan ekonomi pun akan tercapai, dimana tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan taraf hidup bermasyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan, dan mengatasi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dalam mengetahui sukses atau tidaknya proses pembangunan di suatu daerah karena di dalam pembangunan ekonomi terdapat pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan ada perubahan atau tidak dalam pergeseran struktur ekonomi.

3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumbangan PDRB terhadap Provinsi Kepulauan Riau cukup

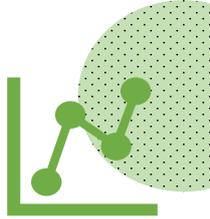
besar selain Kota Batam, dimana Batam yang memang menjadi leader penyumbang PDRB terbesar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Secara rata-rata selama 3 tahun terakhir Kabupaten Natuna menyumbang sebesar 7,77 persen terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi karena Kabupaten Natuna memiliki faktor tanah dan kekayaan alam yang dapat mendukung, seperti yang dikatakan oleh (Sukirno, 2011) bahwa faktor tanah dan kekayaan alam akan mempermudah suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.1. Wilayah dengan Distribusi PDRB ADHB Terhadap Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2021 (%)

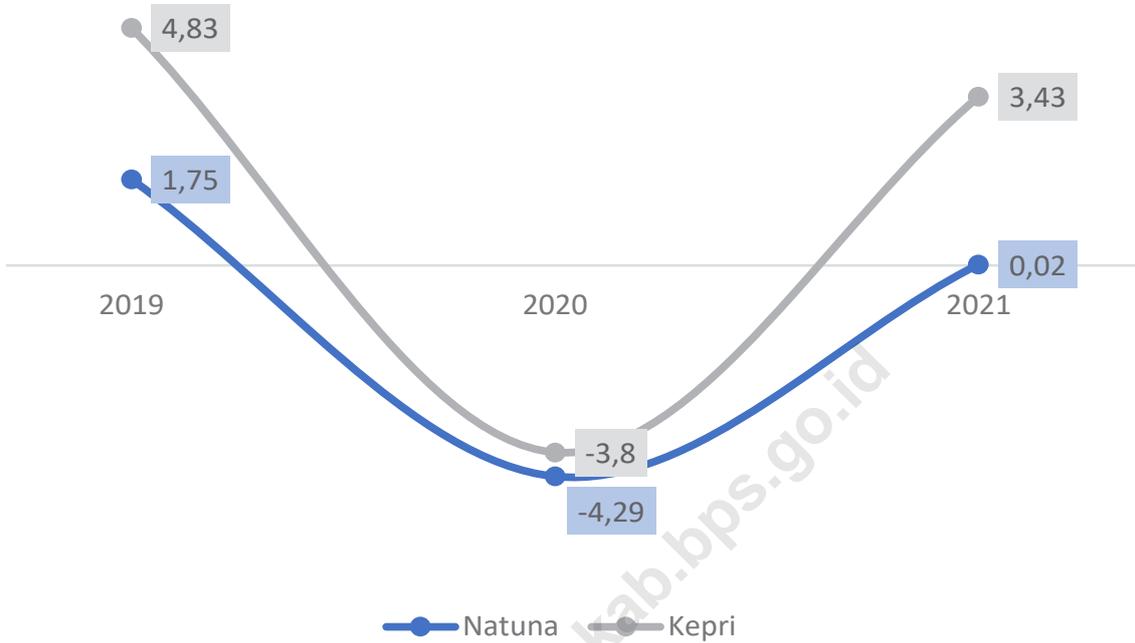
Wilayah Kabupaten/Kota	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau (persen)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	5,15	5,28	5,25
Bintan	8,1	8,22	7,86
Natuna	8,29	7,3	7,72
Lingga	1,63	1,7	1,66
Kepulauan Anambas	6,63	5,73	6,17
Batam	62,54	63,97	63,91
Tanjungpinang	7,67	7,8	7,43

Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Dalam melihat PDRB suatu daerah diperlukan juga melihat laju PDRB dari tahun ke tahun. Laju yang mengalami tren meningkat menandakan telah berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dibuktikan pada gambar berikut :

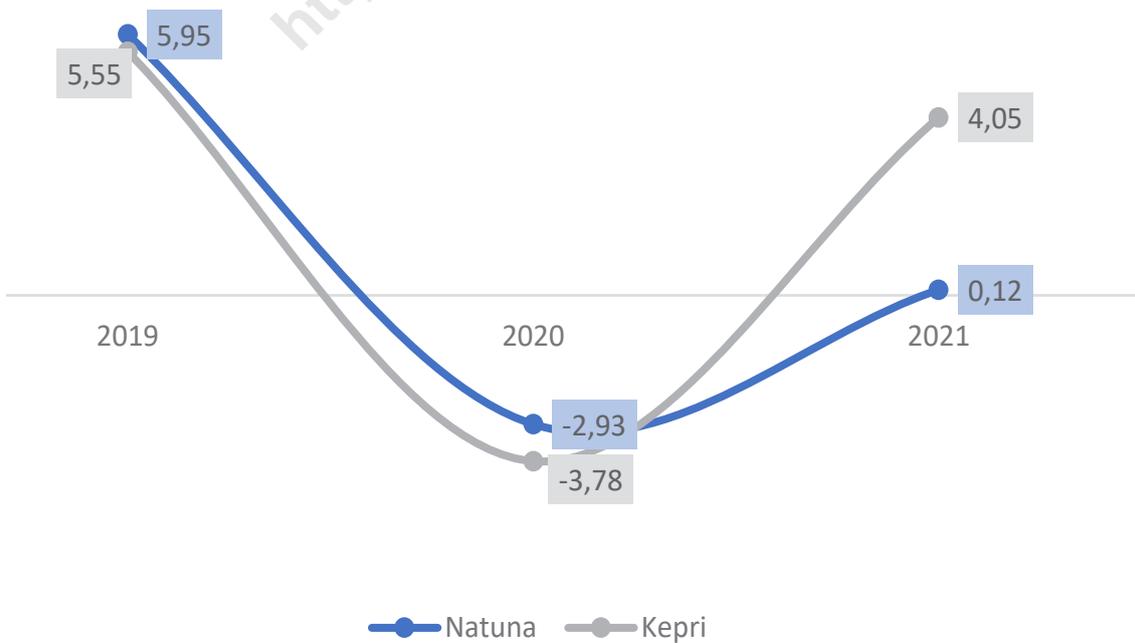


Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau (Tanpa Migas) (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

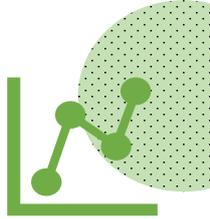
Jika dilihat dari laju pertumbuhan (Gambar 3.1), PDRB Kabupaten Natuna berada dibawah Provinsi Kepulauan Riau. Artinya bahwa PDRB Kabupaten Natuna secara rata-rata masih belum besar memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Berbeda halnya dengan laju pertumbuhan tanpa migas, pada tahun 2019-2020 pertumbuhan Kabupaten Natuna berada diatas pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau. Artinya bila migas dikeluarkan, potensi sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna cukup besar perannya dalam kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut dapat terwujud dengan peran pemerintah yang tepat dalam pengoptimalan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Tabel 3.2. Wilayah dengan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2021

Wilayah Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Tanpa Migas (juta rupiah)			
	2019	2020	2021	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	57,7	52,6	54,7	55,0
Bintan	132,1	130,1	130,7	131,0
Natuna	81,2	78,2	74,4	77,9
Lingga	47,4	43,6	44,7	45,2
Kepulauan Anambas	49,1	67,7	62,4	59,7
Batam	115,8	135,4	140,5	130,6
Tanjungpinang	94,4	86,6	86,1	89,1

Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Jika dilihat ditabel atas, selama tahun 2019-2021 Bintan dan Batam merupakan PDRB per kapita paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau sedangkan yang terendah adalah Lingga, kemudian diikuti oleh Tanjungpinang, Natuna, Kepulauan Anambas dan Karimun.



Apabila pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan PDRB perkapita maka dapat digunakan untuk melihat posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya didalam Provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau didalam buku, "Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau", Natuna pada tahun 2019 menunjukkan relatif sudah maju perekonomiannya dan akan lebih cepat maju. Karena posisi Natuna berada di Kuadran I yang mana mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata. Kemudian pada tahun 2020, terjadi pergeseran kuadran ke III, yang artinya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pada tahun ini dikarenakan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dibawah rata-rata yang dianggap tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya didalam Provinsi Kepulauan Riau. Begitu halnya di tahun 2021, yang masih berada di dalam kuadran III.

3.2. Analisis Location Quotient (LQ)

LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (*Leading Sector*). Location Quotient Yaitu: usaha untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional atau alat analisis yang digunakan dalam mengukur konsentrasi pada suatu aktivitas di wilayah dalam peran aktivitas ataupun industri pada perekonomian nasional. Dalam hitungan basis dan non basis dalam publikasi ini memakai variabel PDRB tanpa migas pada suatu aktivitas dengan struktur ekonomi daerahnya.

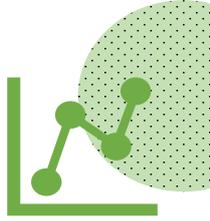


Tabel 3.3. Analisis Location Quotient Kabupaten Natuna, 2019-2021

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	LQ	Ket
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,46	9,23	9,7	9,46	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,35	0,37	0,34	Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,06	0,06	0,06	0,06	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,27	0,27	0,27	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,16	Non Basis
F	Konstruksi	1,27	1,27	1,2	1,25	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,13	1,19	1,22	1,18	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,85	1,04	1,18	1,02	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	1,00	1,12	0,92	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,94	0,88	0,91	0,91	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,16	0,16	0,16	Non Basis
L	Real Estate	1,39	1,58	1,66	1,54	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,17	0,17	0,16	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,61	2,52	2,61	2,58	Basis
P	Jasa Pendidikan	0,37	0,38	0,42	0,39	Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,98	1,01	1,00	Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,43	0,78	0,83	0,68	Non Basis

Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa, selama tahun 2019-2021 sektor basis Natuna terdapat 7 (enam) sektor diantaranya; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor dapat dikatakan basis dikarenakan bahwa sektor basis akan menjadi kekuatan daerah dalam mengeksport produk keluar daerah yang bersangkutan. Sedangkan hasil analisis LQ yang terdapat pada sektor non basis ada 10 (sepuluh) sektor yaitu Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa lainnya. Sektor



yang dikatakan non basis dikarenakan bahwa sektor non basis memiliki kekuatan daerah agar dapat mengimpor produk ke luar daerah.

3.3. Analisis Shift-Share

Merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan struktur perekonomian nasional. Teknik ini menggambarkan Performance (kinerja) sektor-sektor disuatu wilayah/daerah dibandingkan kinerja perekonomian (acuan). Merupakan suatu teknik membagi atau menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan nilai suatu variable/indicator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Dalam analisis shift share terdapat komponen pertumbuhan sektoral (PS) dan Daya Saing (DS). Kedua komponen ini dapat melihat pertumbuhan dan daya saing terhadap kabupaten/kota di sebuah provinsi.

Komponen pertumbuhan sektoral (PS) timbul dikarenakan adanya perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan input antara, perbedaan dalam kebijakan industry serta kebijakan perpajakan, subsidi, dan kontrol harga pasar serta perbedaan struktur dan keragaman pasar. Pada komponen pertumbuhan sektoral, nilai PS yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa sektor pada wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat, sebaliknya nilai PS kurang dari nol menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat.



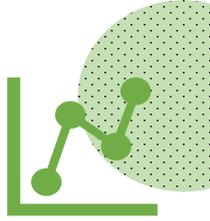
Tabel 3.4. Pertumbuhan Sektoral (PS) Kabupaten Natuna, 2019-2021

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	PS
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,01	0,03	-0,04	-0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,06	-0,16	-0,01	-0,08
C	Industri Pengolahan	0,01	0,06	0,01	0,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,02	0,00	0,00	-0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,01	-0,02	0,01	-0,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,01	-0,06	-0,01	-0,03
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,15	-0,34	-0,11	-0,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	-0,37	-0,07	-0,14
J	Informasi dan Komunikasi	0,05	0,18	0,04	0,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,00	0,02	-0,03	-0,00
L	Real Estate	-0,03	-0,06	-0,01	-0,03
M,N	Jasa Perusahaan	-0,01	-0,24	0,02	-0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,01	0,09	-0,05	0,01
P	Jasa Pendidikan	-0,02	0,00	-0,05	-0,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,02	0,04	0,03	0,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,03	-0,42	-0,07	-0,17

Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Pada tabel diatas dapat terlihat selama tahun 2019-2021 secara rata-rata terdapat 5 (lima) sektor yang hanya mengalami pertumbuhan yang cepat. Diantaranya yakni sektor Industri Pengolahan; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat antara lain adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Real Estate; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Lainnya. Pengaruh



pertumbuhan sektoral yang negative ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik sektoral yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan kabupaten/kota lainnya, dimana sektor-sektor tumbuh negatif tersebut tidak berspesialisasi dalam sektor Provinsi Kepulauan Riau. Sektor yang mengalami pertumbuhan lambat ini perlu dipacu lagi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna.

Cepat atau lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan dan prasarana sosial ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah yang bersangkutan. Tingkat daya saing wilayah dengan wilayah lain dalam analisis shift share dicerminkan dalam komponen pertumbuhan daya saing wilayah (DS). Dua komponen shift (pergeseran) pada metode analisis shift share memisahkan unsur-unsur atau pengaruh pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat eksternal dan internal. Shifting atau pergeseran yang terjadi pada komponen pertumbuhan sektoral adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor luar yang bekerja secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan shifting atau pergeseran yang terjadi pada komponen pertumbuhan daya saing wilayah adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor khusus yang bekerja di wilayah yang bersangkutan.

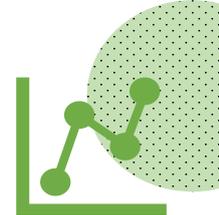


Tabel 3.5. Daya Saing (DS) Kabupaten Natuna, 2019-2021

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	DS
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,01	-0,03	0,02	- 0,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,16	0,01	0,06
C	Industri Pengolahan	-0,06	-0,01	-0,04	-0,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,04	0,04	-0,03	-0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,1	0,06	0,05	0,00
F	Konstruksi	0,02	0,00	-0,09	-0,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,01	0,04	0,00	0,01
H	Transportasi dan Pergudangan	0,16	0,15	0,09	0,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,03	0,35	0,08	0,13
J	Informasi dan Komunikasi	-0,04	-0,07	0,00	-0,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,04	0,04	0,00	-0,00
L	Real Estate	0,04	0,12	0,02	0,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,19	-0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,04	-0,04	0,00	-0,00
P	Jasa Pendidikan	0,01	0,02	0,06	0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,00	-0,02	0,00	-0,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,01	0,45	0,04	0,17

Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Dari tabel diatas selama tahun 2019-2021, ada beberapa sektor yang mempunyai daya saing baik terhadap kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 9 (Sembilan) sektor yang memiliki daya saing baik di Kabupaten Natuna terhadap Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi



dan Perdagangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Real Estate; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan; dan sektor Jasa Lainnya

3.4. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Natuna

Dari hasil pengelompokan tipologi Klassen selama tahun 2019-2021 terdapat pergeseran sektor. Kabupaten Natuna tidak memiliki sektor yang dinilai "istimewa" keunggulannya kecuali pada tahun 2019, yaitu sektor yang termasuk sektor basis, mempunyai pertumbuhan yang cepat dan mampu berdaya saing di Kabupaten Natuna.

Tabel 3.6. Pengelompokan Tipologi Klassen Kabupaten Natuna, 2019-2021

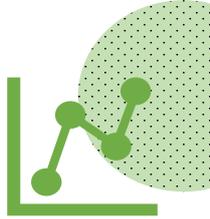
Sektor	Tahun	LQ	PS	DS	Overlay	TS	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	2019	9,46	0,01	0,01	Baik	-0,00	sektor potensial
	2020	9,23	-0,03	-0,03	Baik sekali	0,00	sektor unggulan
	2021	9,70	0,02	0,02	Baik	-0,02	sektor potensial
B	2019	0,29	0,01	0,01	Kurang	-0,05	sektor terbelakang
	2020	0,35	0,16	0,16	Kurang	0,01	sektor berkembang
	2021	0,37	0,01	0,01	Kurang	0,00	sektor berkembang
C	2019	0,06	-0,06	-0,06	Hampir dari cukup	-0,04	sektor terbelakang
	2020	0,06	-0,01	-0,01	Hampir dari cukup	0,05	sektor terbelakang
	2021	0,06	-0,04	-0,04	Hampir dari cukup	-0,02	sektor terbelakang
D	2019	0,26	-0,04	-0,04	Kurang sekali	-0,06	sektor terbelakang
	2020	0,27	0,04	0,04	Cukup	0,04	sektor berkembang
	2021	0,27	-0,03	-0,03	Kurang sekali	-0,03	sektor terbelakang
E	2019	0,15	-0,1	-0,1	Hampir dari cukup	-0,09	sektor terbelakang
	2020	0,16	0,06	0,06	Cukup	0,07	sektor berkembang
	2021	0,17	0,05	0,05	Kurang	0,05	sektor berkembang
F	2019	1,27	0,02	0,02	Istimewa	0,02	sektor unggulan
	2020	1,27	0,00	0,00	Naik	-0,02	sektor potensial
	2021	1,2	-0,09	-0,09	Baik sekali	-0,08	sektor potensial
G	2019	1,13	-0,01	-0,01	Lebih dari cukup	-0,01	sektor potensial
	2020	1,19	0,04	0,04	Baik	-0,02	sektor potensial
	2021	1,22	0	0	Lebih dari cukup	-0,02	sektor potensial
H	2019	0,85	0,16	0,16	Kurang	0,01	sektor berkembang
	2020	1,04	0,15	0,15	Baik	-0,19	sektor potensial

Bab 3 ANALISIS SEKTOR UNGGULAN

	2021	1,18	0,09	0,09	Baik	-0,02	sektor potensial
I	2019	0,64	-0,03	-0,03	Hampir dari cukup	-0,00	sektor terbelakang
	2020	1,00	0,35	0,35	Baik	-0,02	sektor potensial
	2021	1,12	0,08	0,08	Baik	0,01	sektor unggulan
J	2019	0,94	-0,04	-0,04	Cukup	0,01	sektor berkembang
	2020	0,88	-0,07	-0,07	Hampir dari cukup	0,11	sektor berkembang
	2021	0,91	0	0	Hampir dari cukup	0,04	sektor berkembang
K	2019	0,15	-0,04	-0,04	Kurang sekali	-0,04	sektor terbelakang
	2020	0,16	0,04	0,04	Cukup	0,06	sektor berkembang
	2021	0,16	0	0	Kurang	-0,03	sektor terbelakang
L	2019	1,39	0,04	0,04	Baik	0,01	sektor unggulan
	2020	1,58	0,12	0,12	Baik	0,06	sektor unggulan
	2021	1,66	0,02	0,02	Baik	0,01	sektor unggulan
M,N	2019	0,13	0,04	0,04	Kurang	-0,02	sektor terbelakang
	2020	0,17	0,19	0,19	Kurang	-0,05	sektor terbelakang
	2021	0,17	-0,05	-0,05	Hampir dari cukup	-0,02	sektor terbelakang
O	2019	2,61	0,04	0,04	Baik	0,03	sektor unggulan
	2020	2,52	-0,04	-0,04	Baik sekali	0,05	sektor unggulan
	2021	2,61	0	0	Baik	-0,05	sektor potensial
P	2019	0,37	0,01	0,01	Kurang	-0,01	sektor terbelakang
	2020	0,38	0,02	0,02	Cukup	0,02	sektor berkembang
	2021	0,42	0,06	0,06	Kurang	0,01	sektor berkembang
Q	2019	1,00	0	0	Lebih dari cukup	-0,03	sektor potensial
	2020	0,98	-0,02	-0,02	Hampir dari cukup	0,02	sektor berkembang
	2021	1,01	0	0	Baik sekali	0,02	sektor unggulan
R,S,T,U	2019	0,43	0,01	0,01	Kurang	-0,03	sektor terbelakang
	2020	0,78	0,45	0,45	Kurang	0,02	sektor berkembang
	2021	0,83	0,04	0,04	Kurang	-0,03	sektor terbelakang

Sumber: BPS Provinsi Kepri diolah, 2022

Sektor yang dinilai "baik sekali" karena termasuk sektor basis, mempunyai pertumbuhan yang cepat, namun kurang berdaya saing adalah sektor Konstruksi; serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sektor yang di nilai "baik" antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Real Estate; serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor-sektor tersebut tergolong sektor basis, namun pertumbuhannya lambat, sedangkan daya saingnya baik.



Kabupaten Natuna tidak memiliki sektor yang dinilai “cukup” keunggulannya. Sektor yang dinilai cukup adalah sektor basis, namun pertumbuhan cepat dan mampu berdaya saing. Sektor yang dinilai “hampir dari cukup” keunggulannya karena bukan sektor basis dan kurang berdaya saing, namun pertumbuhannya cepat, yaitu sektor Industri Pengolahan; sektor Informasi dan Komunikasi; dan sektor Jasa Perusahaan.

Kabupaten Natuna pada bila dilihat pergerakan dari tahun 2020 ke 2021 memiliki lima sektor yang dinilai “kurang”. Sektor ini bukan sektor basis dan pertumbuhannya lambat, namun berdaya saing baik. Sektor yang dinilai “kurang” keunggulannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Jasa Pendidikan; dan sektor Jasa lainnya.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Natuna merupakan sektor yang pertumbuhan lambat dan kurang berdaya saing atau sektor yang dinilai “lebih dari cukup” keunggulannya.

Keadaan Kabupaten Natuna dari 2020 ke 2021 memiliki satu sektor yang keunggulannya dinilai “kurang sekali”, sektor ini bukan sektor basis, pertumbuhannya lambat dan kurang berdaya saing. Sektor tersebut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://natunakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Jl. HR. Soebrantas, Sual
RT 01 Rw 05, Ranai, Bunguran Timur
<http://natunakab.bps.go.id> Email: bps2103@bps.go.id